

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI  
PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KETAHANAN  
PANGAN KABUPATEN SINJAI**



Oleh:

IZZATUL MUSYARRIFA

Nomor Induk Mahasiswa: 105611129119

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI  
PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KETAHANAN  
PANGAN KABUPATEN SINJAI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**



## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Efektivitas Penerapan Sistem Informasi  
Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan  
Pangan Kabupaten Sinjai.  
Nama Mahasiswa : Izzatul Musyarrifa  
Nomor Induk Mahasiswa : 105611129119  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

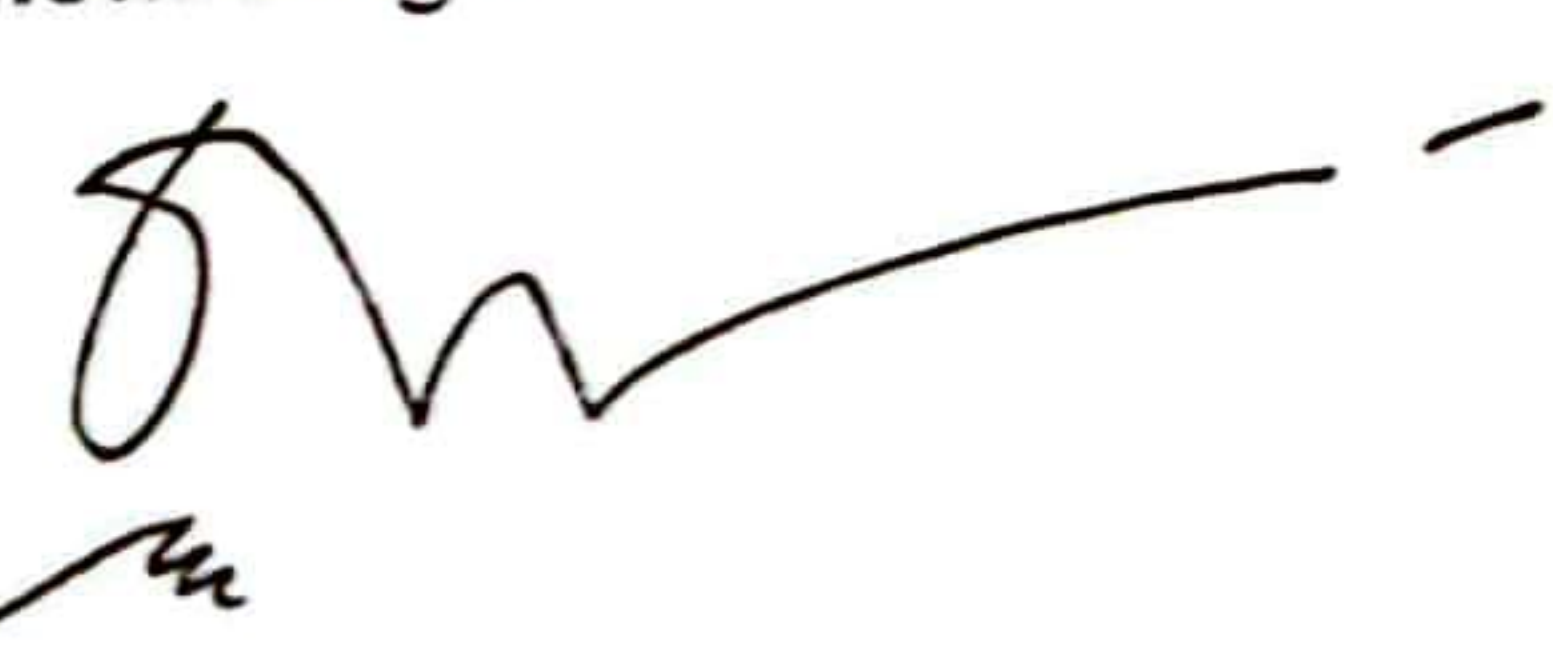
Menyetujui:

Pembimbing I

  
**Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si**



Pembimbing II

  
**Muh. Yusuf, S.Sos., M.Si**


Mengetahui:

Dekan

  
**Dr. Hj. Ihyani Malik., S.Sos., M.Si**  
NBM : 730727



Ketua Program Studi

  
**Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si**  
NBM : 991742



## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0200/FSP/A.4-II/XII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu tanggal 08 November 2023.

Mengetahui:

Ketua



Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik., S.Sos., M.Si  
NBM : 730727

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si  
NBM : 992797

Tim Penguji:

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si
2. Dr. Hafiz Elfiansyah Parawu, M.Si
3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP
4. Nur Khaerah, S. IP., M.IP



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Izzatul Musyarrifa  
Nomor Induk Mahasiswa : 105611129119  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.



Makassar, 08 November 2023

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Izzatul Musyarrifa", written over a large, stylized oval shape.

Izzatul Musyarrifa



## ABSTRAK

### **IZZATUL MUSYARRIFA, 2023 EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI.**

(Dibimbing oleh Ibu Andi Rosdianti Razak, dan Bapak Muh. Yusuf).

Penelitian ini dibuat dengan maksud mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai dalam menunjang pelaksanaan penganggaran dan program kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi (pengamatan), wawancara (interview) dan dokumentasi. Adapun pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, trigulasi teknik, dan trigulasi waktu. Teknik dan waktu kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian yaitu penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam menunjang pelaksanaan penganggaran dan program kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai yang mulai diterapkan pada tahun 2020 yang merupakan inisiasi dari Kemenpan. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yaitu perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu tahun kedepan dan dari perencanaan itu dapat memuat perencanaan penganggaran yang bisa digunakan Kasubag Program dan Keuangan yang nantinya menjadi dokumen rencana kerja anggaran dan daftar pelaksana anggaran kemudian dokumen tersebut yang akan digunakan dalam mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat dilaporkan, terinformasikan secara efektif dan efisien dalam Pelaksanaan program kerja dan penganggaran daerah secara akuntabel serta dapat mempercepat atau mengefektivitaskan pekerjaan dipemerintahan.

**Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan program kerja dan penganggaran, Aplikasi**

**SIPD**

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Muh. Yusuf, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kedua orang tua bapak Tajuddin dan Ibu Isnawati dan saudara kandung Mukrima Tunnisha, Fathul Rahmat, Miftahul Khaeryah, Fityatul Jannah dan Aulia Al Magfirah serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.

5. Teman-teman yang telah membantu dan memberikan semangat selama pembuatan skripsi

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 20 Oktober 2023





## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Penelitian Terdahulu .....	6
B. Teori dan Konsep .....	10
C. Kerangka Pikir .....	18
D. Fokus Penelitian .....	19
E. Dekripsi Fokus Penelitian .....	20
BAB III .....	22
METODE PENELITIAN.....	22
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	22
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	22
C. Informan.....	23
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Teknik Analisis Data.....	24



F. Teknik Pengebsahan Data.....	25
BAB IV .....	27
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	27
B. Hasil Penelitian .....	38
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	49
BAB V.....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	63





## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	6
Tabel 2 Kerangka Pemikiran.....	19
Tabel 3 Nama-nama Pegawai Di Dinas Ketahanan Pangan .....	28





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.....	32
Gambar 2 Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.....	63
Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Rafiuddin Masudy, S.Sos Kabag Program dan Keuangan.....	64
Gambar 4 Wawancara dengan Ibu Istiqamah Nurdin Sebagai Bendahara Pengeluaran.....	65
Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Fathul Rahmat, A.Md. sebagai Verifikator Keuangan.....	66
Gambar 6 Surat Pengantar Penelitian .....	67
Gambar 7 Surat Permohonan Penelitian .....	68
Gambar 8 Surat Izin Penelitian .....	69
Gambar 9 Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	70
Gambar 10 Surat keterangan bebas plagiat .....	71
Gambar 11 Bebas plagiat Bab 1 .....	72
Gambar 12 Bebas plagiat Bab 2 .....	73
Gambar 13 Bebas plagiat Bab 3 .....	74
Gambar 14 Bebas plagiat Bab 4 .....	75
Gambar 15 Bebas plagiat Bab 5 .....	76

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Menurut Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pemerintahan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Berdasarkan pasal 2 Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang system informasi pemerintah daerah (SIPD) Meliputi informasi pembangunan daerah informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah lainya.

Dalam pasal 6 Permendagri no.70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) ditegaskan bahwa SIPD sebagaimana maksud dalam pasal 4 ayat (2) dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui situs jaringan resmi kementerian negeri salah satu kebijakan penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan teknologi informasi adalah adanya sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pengelolah teknologi informasi baik yang berupa Infrastruktur informasi maupun infrastruktur jaringan sebagai lembaga unit kerja pusat pengelolaan data.



Aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) digunakan disemua Instansi Pemerintahan Daerah dalam perencanaan penganggaran dan program kegiatan dan sistem aplikasi ini memiliki peran penting dalam proses perencanaan penganggaran dan program kegiatan Dengan adanya system aplikasi perencanaan penganggaran dan program kegiatan akan lebih fleksibel,optimal dan efesien diDinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.

Dalam mengembangkan Aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) perlu memperhatikan aspek komunikasi yang sifatnya teknologi maupun non sistem komunikasi yang baik menjadi penentu dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Hal ini sangat berkaitan dengan informasi dalam setiap komunikasi sebagai tolak ukur pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), peran infrastruktur jaringan adalah hal dasar yang membentuk jaringan komunikasi dimulai daerah sampai pusat jaringan komunikasi dapat memudahkan aliran data sehingga terkumpul dalam pusat, data dan informasi dalam pengelolaan yang menjadi informasi dalam pengambilan keputusan. Manfaat jaringan komunikasi juga dapat sebagai sarana untuk memperluas penyebaran informasi dari sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

Teknologi informasi yang sangat mempengaruhi sistem pengolah data dan sistem informasi pada proses perencanaan penganggaran dan program Untuk melakukan pengolahan data secara efektif dan efesien maka diperlukan system informasi terintegrasi yang cepat dan akurat sehingga dapat secara keseluruhan dan mampu mendapatkan informasi yang transparan. Melalui

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD.

Kemendagri Dalam Menunjang Pelaksanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai diharapkan dapat membatu dan meringankan proses perencanaan penganggaran dan program kegiatan yang berguna untuk memudahkan dalam penyusunan program kegiatan dan penyusunan anggaran. Awal penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah, inplementor SIPD menemui kendala karena tidak ada pelatihan resmi tentang SIPD yang diberikan sehingga untuk pelajar SIPD mereka inisiatif melakukan konsultasi kementerian dalam negeri.

Diimplementasikannya sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) khususnya yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai dengan tujuan untuk mewujudkan Pelaksanaan program kerja dan penganggaran daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Namun, pada kenyataannya pengimplementasian ini tidaklah mudah dikarenakan aplikasi tersebut baru dan kurangnya pelatihan, pembagian tanggung jawab yang kurang berjalan dalam menangani OPD.

Atas dasar latar belakang diatas maka diuraikan sebuah penelitian dengan judul: Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:



1. Bagaimana pemahaman program Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana tepat sasaran Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai?
3. Bagaimana tepat waktu Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai?
4. Bagaimana tercapainya tujuan Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai?
5. Bagaimana perubahan nyata Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman program Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui tepat sasaran Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.
3. Untuk mengetahui tepat waktu Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai
4. Untuk mengetahui tercapainya tujuan Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai

5. Untuk mengetahui perubahan nyata Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperluas wawasan dan pengalaman bagi peneliti mengenai Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam menunjang pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Dan Penyusunan Program Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.
- b. Sebagai sarana bagi peneliti untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya serta penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai dalam rangka Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam menunjang pelaksanaan Perencanaan Penganggaran dan Penyusunan Program Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk mengatasi anggapan persamaan dengan penelitian ini, maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITI	JUDUL SKRIPSI	HASIL PENELITIAN
1	Nanda Dias Ekaputra (2021)	Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk	Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk cenderung masih kurang efektif apabila dilihat dari kualitas dokumen RKPD yang dihasilkan dipastikan tidak akan selaras dengan dokumen RPJMD yang sudah ada dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap aplikasi dan perubahan nomenklatur

			<p>program kegiatan yang membingungkan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dokumen RKPD.</p>
2	<p>Nadya Balqis, Zuhrizal Fadhly (2021).</p>	<p>Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat Jurnal Public Policy</p>	<p>Untuk melihat bukti empiris tentang faktor- faktor seperti keterlibatan pemakai, kemampuan teknik personal, ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem informasi, pelatihan dan pendidikan pemakai, keberadaan konsultan, lokasi bagian sistem informasi, komitmen organisasi, motivasi kerja yang mempengaruhi kinerja sistem informasi pembangunan di lingkungan pemerintahan Daerah Serdang Bedagai Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer adalah data yang di kumpulkan dan di satukan</p>



			<p>secara langsung dan objek yang diteliti untuk kepentingan penelitian, Jenis data penelitian ini berupa kuesioner yang bersumber dari jawaban responden atas daftar pertanyaan yang berhubungan dengan Variabel-Variabel yang akan diteliti. Dari Hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa keseluruhan variabel yaitu keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan sistem, kemampuan teknik personal, dukungan pimpinan bagian, formalisasi pengembangan sistem, program pelatihan dan pendidikan pemakai, keberadaan konsultan, lokasi bagian sistem informasi.</p>
3	Muhammad Irfan Nasution	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	BPKAD kota medan telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

	Dan Nurwani, (2021)	(SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan	(SIPD) untuk melakukan kebijakankebijakan yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi program dari pemerintah kota medan
4	Wurara et al., (2020)	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Di Kota Manado	hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Subjek yang di teliti BAPPEDALIT BANG Kabupaten Bogor. Untuk mengisi gap dengan peneliti terdahulu, apa bila peneliti menemukan hambatan yang serupa dalam penerapan sistem informasi pemerintah daerah maka peneliti akan menjelaskan beserta upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut



5	Nasution & Nurwani, 2021	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah BPKAD Kota Medan	fokus pada sistem informasi pemerintah daerah yang mencangkup informasi keuangan daerah yang di kelola oleh BAPPEDALIT BANG Kamembuatan Bogor. Untuk mengisi gap dengan peneliti terdahulu, apa bila peneliti menemukan hambatan yang serupa dalam penerapan sistem informasi pemerintah daerah maka peneliti akan menjelaskan beserta upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut
---	--------------------------------	--	---

## B. Teori dan Konsep

### 1. Efektivitas

Efektivitas merupakan konsep yang sangat penting dalam organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, yang menyangkut jawaban atas pertanyaan "sejauh mana sesuatu telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan yang

telah dicapai.

Menurut Sedarmayanti, (2009) efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Menurut Amin Tunggul Widjaya (1993) mengemukakan efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan". Selanjutnya Permata Weshia (1992) mengatakan efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk membrikan guna yang diharapkan untuk melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu Pertimbangan ekonomi, Pertimbangan fisiologi, Pertimbangan Psikologi dan Pertimbangan Sosial Menurut Richard M. Steers (1980) efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output) Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas menurut Bedjo Siswanto (1990) berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Menurut Handoko (1997) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat



untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Menurut Devung efektivitas adalah tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan dengan tepat dan baik. Menurut Devung (1988) Menurut kamus Administrasi perkantoran efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek yang dikehendaki dalam suatu perbuatan, Secara umum efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan.

Menurut Supriyono (2002) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Sutrisno (2007) mengungkapkan indikator efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Pemahaman program dilihat dari sejauhmana pegawai dapat memahami kegiatan program
2. Tepat sasaran yaitu dilihat dari apa yang diinginkan tercapai atau menjadi kenyataan
3. Tepat waktu yaitu dilihat dari sejauhmana program bisa mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan kegiatan
4. Tercapai tujuan yaitu diukur dengan melalui pencapaian tujuan program yang telah dijalankan
5. Perubahan nyata yaitu diukur sejauhmana program tersebut mampu memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi

masyarakat maupun instansi.

## 2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Pengertian penerapan menurut JS Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1996) penerapan adalah hal, cara atau hasil Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Sedangkan menurut Riant Nugroho, penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan kesanggupan seseorang untuk menerapkan ide, tatacara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip dalam situasi yang nyata. Penerapan ini adalah merupakan proses berfikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman.

### 3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Definisi Sistem Informasi Pemerintah secara umum merupakan sebuah pengembangan dari kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksanaannya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi (Nataniel & Hatta, 2009) Terwujudnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin warga negara untuk mengakses informasi publik adalah syarat minimal yang harus dipenuhi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Good Governance salah satunya adalah menyangkut "transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi; wajib melakukan keterbukaan informasi" (Remaja, 2017: 39).

Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah secara dapat dilakukan secara professional seperti yang terdapat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Sehingga terbitlah Permendagri



Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur teknis pengelolaan SIPD yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat saat ini yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Informasi Pembangunan Daerah Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait. Pelaksanaan pembangunan daerah mudah diperoleh, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah Informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Informasi Keuangan Daerah Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi:
  - a. Perencanaan Anggaran Daerah
  - b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
  - c. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - d. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah

e. Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah

Informasi Keuangan Daerah lainnya Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban

3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait Informasi.

Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah Informasi pembangunan daerah dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah, digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang

dilaksanakan berbasis elektronik.

Profil pembangunan Daerah dirumuskan dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah yang menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik, yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut;

1. Perencanaan data Perencanaan data merupakan tahapan identifikasi kebutuhan data daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang paling sedikit memuat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri. Perencanaan data dilaksanakan pada Bulan Februari untuk pengumpulan data di tahun berjalan yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
2. Pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan berita acara pada tahapan perencanaan data.
3. Pengisian data berbasis elektronik Pengisian data dilakukan dengan memperhatikan perencanaan waktu pengisian data dalam berita acara pada tahapan perencanaan data.
4. Pemeriksaan data berbasis elektronik Pemeriksaan data digunakan untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip satu data Indonesia. Pemeriksaan data dilakukan paling lama Bulan Januari setiap tahunnya.

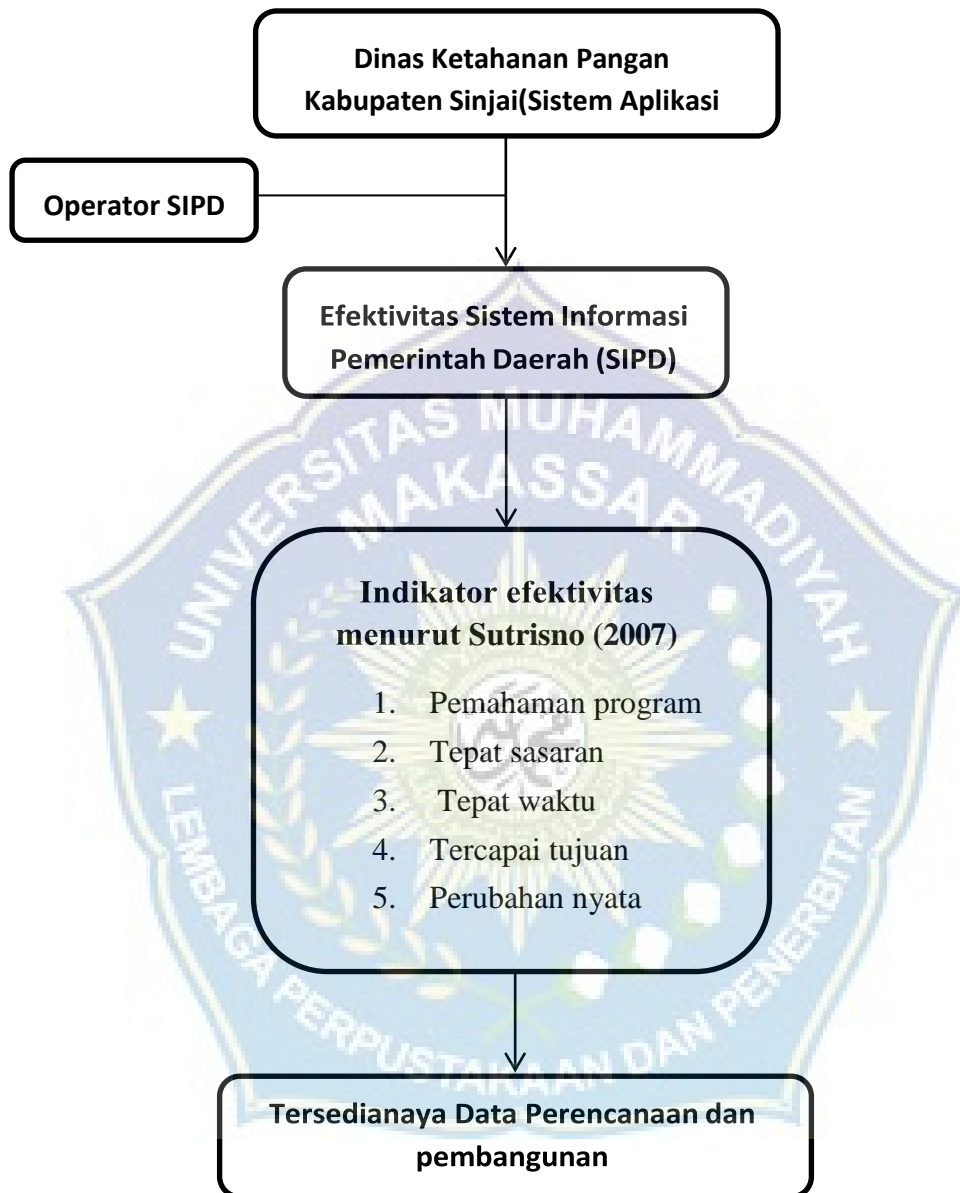


### **C. Kerangka Pikir**

Efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Slameto (2018) efektivitas merupakan daya guna, keaktifan, terdapat kesesuaian pada suatu kegiatan seseorang yang sedang mengerjakan tugas dengan suatu sasaran yang dituju.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai untuk mengetahui proses dan penggunaan aplikasi SIPD sebagai informasi pembangunan Daerah dan pelaksanaan penganggaran dan penyusunan program kerja dimana dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan masih banyak kendala Penelitian tentang efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai. Model kualitatif pendekatan fenomenologi, oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka dilakukan observasi langsung untuk mendapatkan kondisi alamiah dilapangan. Data wawancara dan dokumentasi hasil penelitian dilakukan analisis deskriptif. Analisis terdiri dari organisasi data, pemahaman untuk menemukan tema dan interpretasi dengan dikaitkkan pada teori/konsep maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Tabel 2 Kerangka Pikir



#### D. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah untuk efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam menunjang pelaksanaan Penganggaran dan Penyusunan Program Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Sinjai dengan menggunakan Indikator efektivitas menurut Sutrisno (2007) yaitu : Pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

## **E. Dekripsi Fokus Penelitian**

### **1. Memahami Program**

Pemahaman Program Pemahaman program yaitu melihat bagaimana suatu program dapat membuat pihak yang terlibat mampu mengetahui tugas dan tanggungjawabnya serta memahami maksud dari program yang akan dilaksanakan, dalam hal ini dibutuhkan peranan para pembuat program tersebut dalam melakukan sosialisasi mengenai program itu sendiri.

### **2. Tepat Sasaran**

Di lihat dari bagaimana tujuan dari program tercapai atau berhasil tidaknya program tersebut terwujud.

### **3. Tepat waktu**

Bagaimana dalam suatu kegiatan atau program dapat mengatur dan memanajemenkan waktu dalam pelaksanaan suatu program tersebut sehingga dapat mencapai tujuan yang ada terealisasikan dengan tepat atau bahkan bisa lebih cepat dari yang ditentukan atau juga sebaliknya.

### **4. Tercapainya Tujuan**

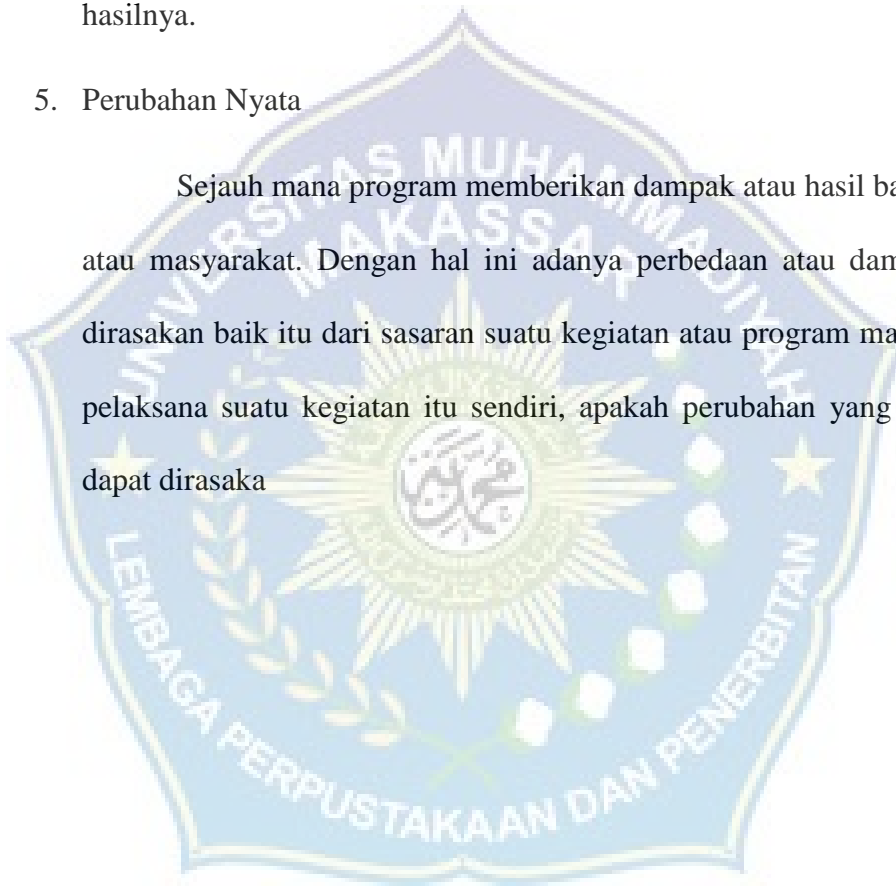
Suatu program tentu dibuat dengan adanya tujuan yang



hendak dicapai, bagaimana proses saat berjalannya suatu kegiatan itu dapat berjalan atau adanya kendala sehingga bisa menjadi penyebab kegagalan dalam mencapai tujuan yang hendak dituju. Sehingga dalam hal diharapkan dapat memahami berbagai situasi dalam proses pencapaian tujuan agar tujuan dapat berjalan dengan sesuai dan dapat dirasakan hasilnya.

#### 5. Perubahan Nyata

Sejauh mana program memberikan dampak atau hasil bagi peserta atau masyarakat. Dengan hal ini adanya perbedaan atau dampak yang dirasakan baik itu dari sasaran suatu kegiatan atau program maupun bagi pelaksana suatu kegiatan itu sendiri, apakah perubahan yang dirasakan dapat dirasaka



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan yaitu pada tanggal 11 Agustus 2023 - 11 Oktober 2023, adapun lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Kelurahan Biringere, penelitian dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai. Sehingga penelitian dapat memperoleh data- data dan informasi yang tepat dan sesuai kenyataan dari berbagai pihak yang terkait

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Salim & Syahrudin (2014) Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi.

Menurut Cholid Narbuko & Abu Achmad (2010) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian

kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang tidak berdasarkan dengan angka yang telah di analisis.

## 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi dimaksud untuk memberikan penjelasan secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami, adapun masalah yang diteliti adalah Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai

### **C. Informan**

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang melakukan penginputan secara langsung, bendahara Pengeluaran pada Sub Bagian Program dan Keuangan yang menginput seluruh laporan keuangan pada SIPD dan Verifikator Keuangan Pada Sub Bagian Program dan Keuangan yang membantu melaksanakan poses perencanaan penganggaran.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian

#### 1. Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang terdapat di lingkungan, baik yang sedang berlangsung saat itu atau masih berjalan

yang meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan penginderaan (Suharsimi Arikunto) dengan adanya Observasi langsung dapat membantu dan memudahkan dalam penelitian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD Dalam Menunjang Pelaksanaan program kerja dan penganggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.

## 2. Wawancara (interview)

Salah satu cara untuk mendapatkan sebuah informasi relevan yang biasa dilakukan oleh satu orang atau lebih, antara narasumber dengan pewawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi yang relevan, pewawancara melontarkan pertanyaannya dan akan dijawab oleh narasumber.

## 3. Dokumentasi

Pengumpulan informasi yang berdasarkan catatan dokumen dan laporan sehingga berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan mengumpulkan data-data atau aplikasi yang akan diteliti.

## **E. Teknik Analisis Data**

Prof Lexy berpendapat teknik analisis data merupakan kegiatan analisis dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan memeriksa semua data dari instrumen penelitian, seperti dokumen, catatan, rekaman, dan lain-lain. Adapun cara dalam menganalisis yaitu:

1. Pengumpulan Data Menurut Suharsimi Arikunto (2000) instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang di pilih dan digunakan oleh



peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam Penelitian ini Peneliti dapat mencatat data secara obyektif dan sesuai hasil dari wawancara dilapangan.

2. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari jika diperlukan.
3. Pengambilan keputusan atau verifikasi merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas Kemudian menarik kesimpulan dengan jelas dan mendukung dari data yang diperoleh.

#### **F. Teknik Pengebsahan Data**

Salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu Sugiyono (2007).

##### **1. Triangulasi Sumber**

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007).

## 2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

## 3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274)

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai**

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai adalah salah satu kantor yang dinaungi Pemerintah Kabupaten Sinjai. Kantor ini berlokasi di jalan H. A. Abd. Latief, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan, Nomor telepon (0482) 2425372.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan yang berasal dari pembiayaan APBD Kabupaten Sinjai, APBD Provinsi Sulawesi Selatan maupun APBN meliputi; Gedung Kantor, Kendaraan bermotor, Peralatan Elektronik dan studio, sarana informasi dan sebagainya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai memiliki 1 unit gedung kantor, yang terletak di jalan H. Abd Latief, Biringere, Kabupaten Sinjai. Gedung kantor yang sekarang digunakan adalah gedung kantor eks Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai, bila dibandingkan dengan jumlah pegawai dan volume pekerjaan/kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan kapasitas gedung saat ini terdapatl 6 unit ruangan dapat dikatakan tidak memadai karena beluml memiliki ruangan rapat tersendiri dan sering

terkena banjir jika musim hujan.

Berikut nama-nama pegawai pada dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Sinjai :

**Tabel 3 Nama-nama Pegawai Di Dinas Ketahanan Pangan**

<b>NO</b>	<b>NAMA PEGAWAI</b>	<b>JABATAN</b>	<b>STATUS KEPEGAWAIAN</b>
1	Ir. H. A. Himawan S, M.Si	Kepala Dinas	ASN
2	Drh. Mappamancu, M.Anim.Sc	Sekretaris Dinas	ASN
3	Mahyuddin SKM,M.Kes	Kabid komsumsi dan ketahanan pangan	ASN
4	MUH. SAFWAN, S.Kom.,M.Si	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan	ASN
5	Asdar Amin, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	ASN
6	Rafiuddin, Masudy, S.Sos	Kasubag Program dan Keuangan	ASN
7	Istiqamah Nurdin	Bendahara Pengeluaran	ASN
8	Irwan Baharuddin	Pengelola Penganekaragaman	ASN
9	Wa Ode Hariati, SP	Analisis Ketahanan Pangan	ASN
10	Andi Nining Angriani Hakim, SP.,M.Si	Analisis Ketahanan Pangan	ASN
11	Nurmaidah Muin, S.TP	Analisis Satuan Pengawas Mutu	ASN
12	Hj. Eryani, S. TP, M. Si	Analisis Ketahanan Pangan	ASN
13	Hj. Ratnaningsih,SP.,M.si	Analisis ketahanan pangan	ASN
14	Indrawati rawi, sp, m.si	Sub kordinator analisis ketahanan	ASN
15	ERNAWATI.SP	Analisis ketahanan pangan	ASN
16	Fitriani,S.Pt	Pengawas Harga Pangan	ASN
17	Magfirah Baharsah, A.Md	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	ASN



18	RENALDY RIADY, S.E	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	ASN
19	NUR WAHIDA, S.P.	Analisis Ketahanan Pangan	ASN
20	DEWI MURNI, S.P	Analisis Pangan	ASN
21	Rischa Awalia Ridwan, S.P.	Ahli Pertama - Analisis Pasar Hasil Pertanian	ASN
22	Juan Fitriansyah, S.T.P.	Ahli Pertama-Analisis Pasar Hasil Pertanian	ASN
23	Irma Kamaruddin, S.TP	Analisis Pangan	ASN
24	GAOTSULLAH AL JALILY, S.T.	Ahli Pertama - Analisis Ketahanan Pangan	ASN
25	TITI SURIANTI, A.Md.P	Pengelola ketersediaan dan kerawanan pangan	ASN
26	M. ALIM RAMLAN, S.P	Penyuluh pangan	ASN
27	Muhammad Asgar, S.P	Penyuluh Pangan	ASN
28	VIVI ELFIRA, S.TP.	Analisis Pangan	ASN
29	Akbar, SP	Analisis pola konsumsi pangan masyarakat	ASN
30	A. Maya Risdayanti A.Md	Pengelola sarana dan prasarana kantor	ASN
31	FATHUL RAHMAT, A.Md.	Verifikator Keuangan	ASN
32	SULAEHA S.P	Staf keamanan pangan	NON ASN
33	Muhajir, SP	Staff umum dan kepegawaian	NON ASN
34	Rezky ciming S.sos	Staf umum dan kepegawaian	NON ASN
35	Akbar, S. Kom	Staf program dan keuangan	NON ASN
36	Hasriani, S.M	Staf program dan keuangan	NON ASN
37	Sitti sutarni, S.Pi	Staf kasi kerawanan pangan	NON ASN
38	Ismail Saleh S.Sos	Staf Bagian Program dan Keuangan	NON ASN

39	ALDIANSYAH, S.P	Staf Bagian Program dan Keuangan	NON ASN
40	RAISUL AWAL	Staf bidang konsumsi dan keamanan pangan	NON ASN
41	NURUL SYUHADANA, S.A.P	Staf kasi penganeekaragaman konsumsi pangan	NON ASN
42	Dinda Febriyanti A.Md.P	Staff Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	NON ASN
43	SAKINAH AINUN.UL., SP	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	NON ASN
44	Andining Anggriani Hasbi, S.A.P	Staf umum dan kepegawaian	NON ASN
45	A. Idzhar Ramlan, SP	Staf umum dan kepegawaian/Sopir	NON ASN
46	Andi Nurmaliah, S.P	Staf Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	NON ASN
47	Rostina SP	Staf bidang konsumsi dan keamanan pangan	NON ASN
48	Ayu anindhita kusaryanti, S.Pi	Staf bidang konsumsi dan keamanan pangan	NON ASN
49	Indriani saktianingsih	Staff sub bagian umum dan kepegawaian	NON ASN
50	Muhammad Noor Amin Sholeh, SP	Staf bidang ketersediaan dan Distribusi Pangan	NON ASN
51	Nursaidah, S.Sos	Staf bidang ketersediaan dan Distribusi Pangan	NON ASN
52	Yayat Hidayat Syam, S.Hut	Staf Umum dan Kepegawaian	NON ASN
53	Muh. Faisal, S.Ip	Staf Kasi Keamanan Pangan	NON ASN
54	A.NURKUMALASARI NATSIR	Staf bidang ketersediaan dan Distribusi Pangan	NON ASN
55	NURLIAH.SP	Staf Bagian Program dan Keuangan	NON ASN

## 2. Visi/Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai

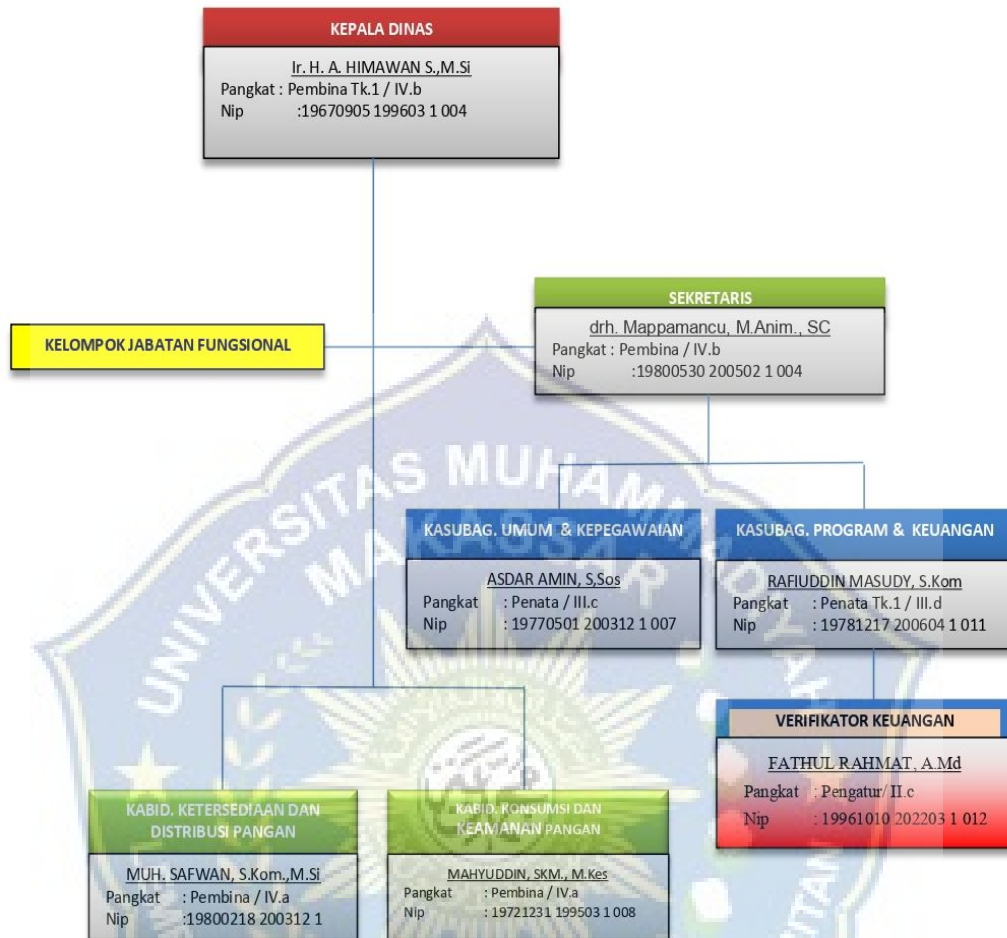
### a. Visi

Terwujudnya masyarakat Sinjai yang mandiri berkeadilan dan religius melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya sains

### b. Misi

- 1) Mewujudkan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
- 2) Membangun kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat
- 3) Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dengan tetap berpegang pada kelestarian lingkungan.
- 4) Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
- 5) Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah khususnya APBD untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
- 6) Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia SDM yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa

### 3. Struktur Organisasi



**Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai**

Tugas pokok dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai yaitu :

#### 1 Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok membantu pelaksanaan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan kepegawaian daerah. Uraian tugas



pokok Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Mengkoordinasikan perumusan rencana strategis.
  - b. Merumuskan rencana kegiatan.
  - c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan, membantu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan.
  - d. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan pelaksanaan tugas bawahan.
  - e. Mengkoordinasikan tugas kepada instansi terkait.
  - f. Memaraf dan menandatangani surat-surat dinas sesuai dengan kewenangannya.
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
2. Sekretaris Dinas

Mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan tahunan, menyusun laporan keuangan, membuat daftar inventaris barang yang menyangkut rumah tangga, administrasi surat menyurat dan kepegawaian.

Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kegiatan Sekretariat.

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
  - c. Memberi bimbingan penyusunan Laporan Keuangan dengan cara mencatat dalam Buku Kas untuk mengetahui penggunaan keuangan.
  - d. Memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bawahan.
  - e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
  - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
  - g. Melaksanakan pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan.
  - h. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan surat menyurat dan kearsipan.
  - i. Mengkoordinasikan tugas bawahan.
  - j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
  - k. Memaraf dan menandatangani naskah dinas.
  - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secretariat kepada atasan.
  - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.
3. Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.

Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan;

- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program dan Keuangan ;
  - c. Melaksanakan pengelolaan program dan Keuangan;
  - d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
  - e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan Keuangan;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.

Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah :

- a. Menyusun program/kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- c. Melaksanakan pengelolaan umum dan kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan umum dan kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;

- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Tugas pokok yaitu membantu kepala dinas ketahanan pangan dalam melaksanakan rumusan kebijakan operasional di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan dalam hal ini:

- a. Menyusun rencana kegiatan
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan.
- c. Perumusan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan
- e. Pensinkronisasian perencanaan program/kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan.
- f. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan di bidang distribusi pangan.
- g. Pelaksanaan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan.
- h. Pelaksanaan pengendalian program kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan.
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan.

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

#### 1. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Tugas pokok yaitu membantu kepala dinas ketahanan pangan dalam melaksanakan rumusan kebijakan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan dalam hal ini:

- a. Menyusun rencana kegiatan Pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan
- b. Perumusan di bidang konsumsi dan keamanan pangan
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- d. Pensinkronisasian perencanaan program/kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- e. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- f. Pelaksanaan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan.
- g. Pelaksanaan pengendalian program kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.



## B. Hasil Penelitian

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.

### 1. Pemahaman program

Kemampuan program adalah bagaimana pegawai bisa memahami dan dapat melaksanakan suatu program. Karena hal inilah peneliti melakukan wawancara dengan tanya jawab langsung kepada informan mengenai pemahaman pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai terhadap program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Langkah awal sebelum dapat memahami dan melaksanakan suatu program adalah dengan dilakukannya sosialisasi terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Hasil wawancara dengan bapak RM selaku Kepala Subag Program dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Berikut Hasil Wawancaranya :

“Sosialisasi sudah dilakukan dan juga dari youtube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri bagaimana tutorial dan hal hal mengenai SIPD sehingga membantu dalam pemahaman terhadap program SIPD ini yang di *share* ke youtube dari situ juga kita belajar.” (wawancara dengan RM Tanggal 22 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi sudah dilakukan, di mulai dari PP Nomor 12 Tahun 2019 yang dipertegas oleh Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 sudah diresmikan sudah mulai dilakukannya sosialisasi, untuk secara umum seluruh pegawai sudah mengetahui apa itu program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah namun dalam segi pemahaman dalam penggunaan aplikasi ini tidak semua pegawai dapat memahaminya karena hanya beberapa pegawai dan kepala badan atau dinas yang dapat mengakses dan menggunakan aplikasi ini.

Selanjutnya wawancara dengan bapak FR selaku Verifikator Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, berikut petikan wawancaranya :

“Atas bentuk bimbingsn teknis yang diberikan baik secara langsung maupun di media sosial tentunya sangat bermanfaat bagi saya selaku operator, karena aplikasi ini terkesan baru digunakan, tidak terlepas dari itu banyak cara yang saya lakukkn yaitu dengan melakukan komunikasi dengan beberapa operator SIPD pada beberapa instansi” (Wawancara dengan FR Tanggal 23 Agustus 2023).

Dri hasil wawancara yang dilakukan dapat memberikn keterangan bahwa secara perlahan dapat menahami aplikasi SIPD karena intens dalam melakukan komunikasi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu IN selaku Bendahara umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, berikut hasil wawancaranya :

“Sebagai bendahara tentunya harus juga memahami aplikasi ini karena bersentuhan langsung dengan jabatan saya selaku bendahara

umum, seperti dalam melihat realisasi kegiatan dalam bentuk program kerja harus juga menginput kemajuan dari pengeluaran yang dilakukan, setiap ada kendala dan hal yang kurang saya pahami maka saya melakukan konsultasi dengan BKAD kabupaten sinjai” (wawancara dengan IN Tanggal 24 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu IN menunjukkan bahwa dalam memahami program banyak hal yang bisa dilakukan dan itu merupakan keharusan, sedikit demi sedikit mulai memahami aplikasi tersebut.

Walaupun ada beberapa kendala seperti dalam sosialisasi karena pada masa pandemi tidak terlalu berdampak bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai dalam memahami sosialisasi program SIPD, dengan adanya teknologi youtube juga membantu dalam pensosialisasian SIPD ini sehingga semakin banyak sumber agar Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai dapat memahami sistem serta prosedur yang ada dalam pada SIPD.

## **2. Tepat sasaran**

Tepat sasaran merupakan bagaimana pelaksanaan program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yakni agar pengelolaan informasi daerah dapat dilakukan secara profesional, dimana dalam SIPD terintegrasi seluruh proses mulai dari perencanaan, hingga pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kaitannya dengan penelitian ini untuk mencari tahu apakah program SIPD pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai sudah tepat sasaran atau

malah sebaliknya. Mengenai ketepatan sasaran program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai masih dikatakan sudah dapat mencapai sasaran yang diinginkan, karena tujuan dari SIPD ini lebih efektifnya urusan pemerintahan daerah, lebih transparansinya kegiatan yang dilakukan pemerintahan daerah, efisiensi waktu yang dapat diminimalisir dengan adanya program SIPD ini sehingga pemantauan dari pusat dapat lebih mudah.

Hasil wawancara dengan Bapak FR Selaku Verifikator Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Berikut hasil Wawancaranya :

“Khusus Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai untuk mengelola Aplikasi SIPD harus dikuasai dibagian Perencanaan dan keuangan jadi sebuah kewajiban menguasai Aplikasi SIPD agar apa yang diharapkan dapat tercapai dan Staf yang ditunjuk khusus operator SIPD yaitu saya sendiri” (Wawancara dengan FR Tanggal 23 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa tidak lain dari aplikasi SIPD ini yaitu mencapai sasaran yaitu sebuah informasi yang akurat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu IN selaku Bendahara Umum pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, berikut petikan wawancaranya :

“Dengan digunakannya sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai dapat lebih efisien dan efektif dalam perencanaan pembangunan daerah dan data laporan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel dan perencanaan itu memuat perencanaan keuangan yang bisa digunakan bendahara yang nantinya terbentuk dokumen Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran itulah yang digunakan Bendahara dalam melakukan pengelolaan keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan, hal tersebut tentunya

akan memberikan informasi kepada masyarakat sehingga bisa mengetahui kinerja kami di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai” (wawancara IN Tanggal 24 Agustus 2023).

Dari Hasil wawancara diatas dipahami bahwa Pelaksanaan pembangunan daerah mulai dan proses perencanaan penganggaran pelaksanaan serta pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi SIPD yang canggih sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan informasi.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak RM Selaku Kepala Subag Program dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Berikut Hasil Wawancaranya :

“Dari beberapa waktu ke waku dimulai dari awal penggunaan SIPD mengalami peningkatan baik dari segi pemahaman maupun hasil, sasaran yang dicapai pun sudah memberikan kemajuan dilihat dari portal SIPD Dinas Ketahanan Pangan yang memberikan sajian data-data yang dapat di akses oleh masyarakat” (wawancara dengan RM Tanggal 22 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa seluruh data sudah tersaji dalam SIPD dan hal itu menunjukkan sasaran telah dicapai.

Walau dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala, namun itu bukan sebuah hambatan dan banyak hal bisa membuat para pegawai yang melaksanakan program SIPD ini lebih memahami dan mengerti sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat lebih menyeluruh atau bahkan bisa dikatan sudah dapat dirasakan hasilnya.



### 3. Tepat waktu

Bagaimana dalam pelaksanaan suatu program harus sesuai dengan jadwal atau waktu yang ditentukan agar proses yang ada dalam SIPD berjalan lancar dan maksimal.

Hasil wawancara dengan bapak RM Selaku Kepala Subag Program dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Berikut Hasil Wawancaranya :

“Sekarang ini segala proses yang ada di SIPD dapat dikatakan sudah tepat waktu sudah sesuai jadwal yang ada, karena setiap kegiatan ada aturan yang mengatur jadwal yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Mungkin waktu diawal pelaksanaan SIPD saja yang terkendala pencairan gaji karena adanya masalah pada SIPD sehingga kita harus mutar balik kembali segala prosesnya melalui SIMAKDA tapi sekarang sudah berjalan lancar”. (wawancara dengan RM Tanggal 22 Agustus 2023).

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa segala suatu kegiatan yang ada dipemerintahan sudah ada jadwal yang ditentukan sebelumnya, sehingga sebisa mungkin pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang ada.

Hasil wawancara dengan Bapak FR Selaku Verifikator Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, berikut hasil Wawancaranya :

“Dalam penginputan segala data-data baik pembangunan maupun dalam rincian program kerja harus sesuai jadwal yang telah diberikan dan itu punya batas waktu, jadi saya diwajibkan untuk menyelesaikannya sesuai jadwal tersebut, dengan bantuan oleh segala penanggung jawab bidang segala kebutuhan dapat saya selesaikan sesuai dengan waktunya” (Wawancara dengan FR Tanggal 23 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku operator sudah dilakukan dengan tepat waktu dan data-data sudah tersaji di SIPD.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu IN selaku Bendahara umum pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, berikut petikan wawancaranya :

“Dalam pelaporan segala bentuk realisasi kegiatan yang memiliki pengeluaran maka perlu dilakukan penginputan dan hal tersebut juga memiliki batas waktu, dan harus sesuai dengan rencana kerja instansi, sejauh ini saya bisa menyesuaikan dengan aplikasi dan menggunakannya dalam melaksanakan segala bentuk pengeluaran dari berbagai kegiatan yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai” (wawancara IN Tanggal 24 Agustus 2023).

Pernyataan dari ibu IN menunjukkan bahwa dalam bentuk penginputan dan pelaporan pengeluaran disetiap program kerja sudah dijalankan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Sarana dan prasarana yang menjadi salah satu penunjang kesuksesan dalam pelaksanaan SIPD ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai agar berjalan sesuai jadwalnya dan sasarannya sudah menyediakan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk digunakan diantaranya memiliki komputer yang masih bagus dan juga hampir diseluruh meja pegawai disediakan komputer, kemudian jaringan wifi yang tersedia, dan ruangan kerja yang nyaman.

#### **4. Tercapai tujuan**

Tercapainya tujuan program adalah tujuan yang ingin dicapai sebuah organisasi ataupun pemerintah dalam pelaksanaan suatu program,

begitu juga dalam pelaksanaan program SIPD ini yang menginginkan informasi pemerintahan daerah yang lebih profesional, transparansi, inovatif serta pemantauannya dapat dilakukan dari satu aplikasi saja. Baik SIPD perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggung jawaban memiliki suatu koneksi yang saling berhubungan, sehingga tetap adanya pengendalian dalam pelaksanaannya, karena saling berkaitan sehingga jika ada masalah pada salah satu bagiannya itu akan mempengaruhi bagian yang lainnya sehingga Kepala Dinas, para kabid dan PPTK memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan SIPD pada masing masing bagiannya, tidak terkecuali pegawai yang mengisi SIPD itu sendiri.

Hasil wawancara dengan Bapak RM Selaku Kepala Subag Program dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Berikut Hasil Wawancaranya :

"Karena ini Aplikasi yang dikelola oleh pusat jadi terkadang ada beberapa masalah yang ada diaplikasi terkadang juga karena banyaknya User yang mengakses langsung dengan waktu yang bersamaan biasa terjadi *high* pada aplikasi tersebut. Kemudian yang namanya aplikasi sistem jaringan jadi biasa kendalanya di jaringan kalau jaringan bagus pekerjaan akan lancar begitupun sebaliknya, hal tersebut tidak membuat kewajiban saya tertunda dari tujuan awal aplikasi SIPD ini yaitu informasi pemerintahan daerah yang lebih profesional, transparansi, inovatif sudah kami jalankan." (wawancara dengan RM Tanggal 22 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara dengan bapak RM menunjukkan bahwa tujuan dari SIPD ini sudah tercapai dengan terlaksananya segala permintaan dan kebutuhan yang ada di SIPD dan informasi itu dapat diakses masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu IN selaku Bendahara umum pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, berikut petikan wawancaranya :

“Segala hal yang berkaitan dengan pengeluaran disetiap kegiatan sudah disapaikan dan dirincikan kedalam SIPD, hal tersebut bisa diuji dan dibuktikan ketika pihak dari BKAD memberikan keterangan dari anggaran dan realisasi sudah seimbang atau *blance*” (wawancara IN Tanggal 24 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara ibu IN menunjukkan bahwa segala bentuk laporan dan permintaan data dari bendahara umum sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang beerlaku.

Hasil wawancara dengan Bapak FR Selaku Verifikator Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, berikut hasil wawancaranya :

“Segala keperluan dan kebutuhan sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah tersaji pada SIPD, aplikasi ini sangat membantu dan memudahkan karena dapat tersinkron dan meminimalisir kesalahan” (Wawancara dengan FR Tanggal 23 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara dengan bapak FR menunjukkan bahwa semua data sudah tersaji dengan lengkap sesuai apa yang diminta.

Setiap kegiatan akan tetap ada pengawasan serta evaluasi yang akan diberikan, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja selaku pembuat program, namun setiap pemegang pertanggung jawaban juga melakukan pengawasan terhadap tugas yang dimilikinya, seperti ketua IT yang memantau berjalannya setiap kegiatan SIPD penganggaran dan penatausahaan secara lancar dan sesuai dengan aturan yang ada, setiap kepala bidang juga akan bertanggung jawab mengawasi bagian tugasnya, begitu juga dengan kepala badan atau kepala dinas, kepala daerah, dan

pemerintah pusat itu sendiri sehingga, dengan adanya pengawasan dalam setiap kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kegiatan program SIPD kedepannya.

## 5. Perubahan nyata

Dimana suatu program mampu membuat suatu kemajuan, gebrakan baru, ataupun sesuatu yang terlihat perubahannya dari sebelumnya. Dengan adanya perubahan yang nyata dalam suatu program juga dapat melihat bagaimana pelaksanaannya berjalan dapat dikatakan berhasil mencapai tujuannya, jika sebaliknya tidak ada perubahan yang dirasakan maka program yang dilaksanakan belum berhasil ataupun tidak berhasil mencapai tujuannya.

Hasil wawancara dengan ibu IN Selaku Bendahara Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, berikut hasil wawancaranya :

”Perubahan yang dirasakan yaitu aplikasi SIPD ini jika dimulai dari perencanaan hingga pelaporan kegiatan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan 100% tanpa aplikasi pembantu sangat bagus, karena waktu bisa lebih efisien dan pusat dapat memantau perkembangan pemerintahan daerah dari SIPD ini dan lebih transparansi” (wawancara IN Tanggal 24 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa aplikasi SIPD sangat membantu dan memudahkan dalam melakukan perencanaan dan melakukan pelaporan pengeluaran pada setiap kegiatan yang telah dilakukan.

Hasil wawancara dengan Bapak FR Selaku Verifikator Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, berikut hasil wawancaranya :



“pada saat awal melakukan perencanaan penganggaran dan program kerja dengan menginput secara manual sangat menguras tenaga dan membutuhkan waktu yang lama, bukan hanya itu kesalahan-kesalahan juga dalam penginputan sering terjadi sehingga terkadang dilakukan pengulangan untuk memperbaiki kesalahan” (Wawancara dengan FR Tanggal 23 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara peneliti dapat simpulkan bahwa tentu adanya perubahan yang dirasakan dengan sebelum penggunaan SIPD ini, SIPD ini lebih banyak memangkas kegiatan dari saat sebelum menggunakan SIPD, seperti perencanaan, penganggaran serta penatausahaan dalam pekerjaan dan pelaporannya masing masing.

Hasil wawancara dengan Bapak RM Selaku Kepala Subag Program dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Berikut Hasil Wawancaranya :

“Perkembangan teknologi memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam melakukan perencanaan penganggaran dan program kerja, adanya aplikasi SIPD sangat memberikan kemudahan kepada kami dan sangat membantu, semoga aplikasi ini bisa dipertahankan dan dikembangkan lagi” (wawancara dengan RM Tanggal 22 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara dengan bapak RM memberikan penjelasan bahwa aplikasi ini memberikan perubahan nyata, dengan segala kemudahan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi untuk mengetahui kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.

Sekarang dalam satu aplikasi SIPD sudah terangkum segala kegiatan dimulai dari perencanaan hingga pelaporan tersedia, SIPD tidak lagi mengenal belanja langsung dan tidak langsung, karena yang

ada seperti belanja pegawai, barang dan jasa dan lainnya, lebih mudah diawasi kegiatannya karena langsung terhubung ke pusat, lebih transparansi, lebih professional serta efisien.

Dapat dilihat bahwa perubahan pasti ada, karena tujuan dari pembuatan suatu program atau kegiatan tentunya menginginkan perubahan dari keadaan atau situasi sebelumnya, jika dulu berbagai proses kegiatan pemerintahan daerah memiliki masing-masing media atau aplikasinya sendiri seperti aplikasi SIMAKDA (Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah) dan SIADINDA (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Dinas Daerah), yang penggunaannya hanya terbatas seperti SIMAKDA hanya bisa digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai saja sedangkan dinas lainnya menggunakan SIADINDA, sehingga banyaknya pemangkasan kegiatan dan penyatuan seluruh proses kegiatan pemerintahan daerah pada aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) ini, yang sangat jelas perubahan yang dirasakan oleh para pegawai.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Peneliti akan menyajikan data dan membahas hasil dari observasi dan wawancara langsung yang peneliti lakukan dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai yaitu kepada Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, Bendahara umum dan Verifikator Keuangan.

Fokus dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai ini bagaimana pegawai yang menjalankan program ini sudah memahami apa itu SIPD, sudah berjalan sesuai prosedur yang ada, dapat melaksanakan program ini sudah mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan dari program ini apakah sudah terlaksanakan dengan baik, adakah perubahan yang dirasakan saat sebelum dan sesudah penggunaan SIPD ini, atau malah sebaliknya belum mampu memahami penggunaan program SIPD.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah Menurut Permendagn No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pemerintahan daerah informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggara pembangunan daerah Berdasarkan pasal 2 Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang system informasi pemerintah daerah (SIPD) Meliputi informasi pembangunan daerah informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah lainnya.

Dalam pasal 6 Permendagn no 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) ditegaskan bahwa SIPD sebagaimana maksud dalam pasal 4 avar (2) dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik SIPD sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dapat diakses melalui situs jaringan resmi kementrian negen salah satu kebijakan penting yang perlu dilakukan oleh pemenniah daerah dalam pengembangan teknologi

informasi adalah adanya sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pengelolah teknologi informas, baik yang berupa Infrastruktur informasi maupun infrastruktur jaringan sebagai lembaga unit kerja pusat pengelolaan data.

Untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam menunjang pelaksanaan penyusunan anggaran dan program kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai adapun indikator-indikator yaitu :

#### **1. Pemahaman program**

Menurul Amin Tunggul Widjaya (1993) mengemukakan Efektivitas yang kaitannya dengan kaitan indikator pemahaman program adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan Efektivitas yaitu suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan Efektivitas yaitu penyelesaian pekerjaan dengan dasar pemahaman, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut.

Dalam hal ini pemahaman program yang terjadi di lapangan berdasarkan keadaptasian yang dilihat dari kualitas produk yang dihasilkan dengan adanya SIPD yaitu sudah terdokumentasikannya program usulan yang sudah disetujui ataupun belum disetujui, bahwa usulan program sebagai bentuk permintaan dari Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Sinjai hanya memilih program dan kegiatan berdasarkan menu pilihan program dan kegiatan yang sudah tertera di dalam aplikasi dengan didasarkan pada Permendagri nomor 70 tahun 2019.

Adapun cara dalam penggunaan aplikasi system informasi pemerintah daerah SIPD yaitu:

1. Login Akun Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Proses-proses dalam penggunaan Aplikasi SIPD pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai yaitu
  - a. Masuk ke laman SIPD Kab/Kota Domisili Semua akun yang terdaftar pada SIPD Provinsi maupun yang terdaftar pada SIPD Kab/Kota, dapat melakukan LOG IN pada SIPD kab/kota domisili.
  - b. Pilih Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - c. LOG IN menggunakan usemame dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk akun Lembaga usemame adalah nomor NPWP Sedangkan untuk akun individu, usemame adalah Nip.
  - d. Pilih Tahun 2023

Bentuk pertanggungjawabannya, Bappeda selalu memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah yang masih kesulitan untuk memahami maupun mengoperasikan aplikasi. Komunikasi implementasi aplikasi SIPD telah dilakukan sosialisasi dengan memanggil setiap perwakilan instansi khususnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai. Sosialisasi ini dilakukan guna memperkenalkan penggunaan pengaplikasian SIPD dan akan mengadakan rapat evaluasi penggunaan



aplikasi SIPD setiap 3 bulan sekali. Pelaksana SIPD memiliki tugas dalam mengisi, mengumpulkan, dan memvalidasi data yang dimana Bappeda menyiapkan format isian data yang kemudian setelah setiap instansi mengisi format tersebut akan dikembalikan lagi kepada Bappeda.

Jadi sejalan yang dinyatakan jika pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan yang menggunakan teknologi (elektronik) ialah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka perkembangan pelayanan untuk masyarakat sangat diharapkan sebagai bentuk dorongan dukungan (Perpres No 95, 2018). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini sangat bagus diimplementasikan. Sistem ini diimplementasikan untuk mendorong pelaksanaan informasi yang efektif, inovatif, serta berkualitas dengan menggiatkan substansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 disetiap pemerintahan kab/kota.

## **2. Tepat sasaran**

Karakteristik Sistem Menurut Hartono, (2004) efektivitas kaitan dengan indikator tepat sasaran, bahwa suatu sistem memiliki cir-ciri atau karakteristik tertentu, yakni memiliki komponen sasaran Sistem ,yang dimaksud yaitu tujuan atau objektif yang ingin dicapai oleh sebuah sistem, tanpa adanya sasaran atau tujuan, sistem tidak akan memiliki nilai dan manfaat yang jelas. Keberhasilan sebuah sistem diukur berdasarkan sejauh mana sistem tersebut dapat mencapai sasarannya atau tujuannya.

Dalam hal ini efektivitas dengan indikator tepat sasaran yang terjadi dilapangan menunjukan bahwa Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Sinjai telah menggunakan aplikasi berbasis web ini untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi program dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai. Namun, karena sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) ini merupakan aplikasi yang masih baru, proses penerapan yang dilakukan tentu masih banyak kendala yang di dapatkan. Tapi dengan berjalannya waktu, berbagai kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam sistem ini pasti akan diperbaiki dan akan terus di upgrade agar berbagai harapan yang mendasari dibentuknya aplikasi ini akan terpenuhi.

### **3. Tepat waktu**

Therese Hoff Macan (1990) mengatakan bahwa manajemen waktu merupakan pengaturan diri dalam menyikapi waktu seefektif dan seefisien mungkin dengan melakukan perencanaan, penjadwalan, mempunyai kontrol atas waktu, selalu membuat skala prioritas menurut kepentingannya, serta keinginan untuk terorganisasi yang dapat dilihat dari perilaku seperti mengatur tempat kerja dan tidak menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan. Efektifitas dapat terlihat dari tercapainya target atau tujuan manajemen waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan kata efisien tidak lain mengandung 2 (dua) makna, yaitu makna pengurangan waktu yang ditentukan dan makna investasi waktu menggunakan waktu yang telah ada.

Dalam hal ini efektivitas dengan indikator tepat waktu yang terjadi dilapangan menunjukan dalam proses penyusunan perencanaan

pembangunan, SIPD sudah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai dapat mengefektifkan setiap proses penyusunan dokumen perencanaan, baik dalam pengumpulan data perencanaan, penginputan data dan usulan masyarakat, hingga tahap pelaporan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, baik dari pegawai yang belum bisa mengolah data mentah menjadi data yang siap digunakan dalam perencanaan, serta jaringan yang kurang stabil, hambatan lain dalam pelaksanaan SIPD adalah kurangnya fasilitas dan sarana dalam pelaksanaan SIPD berupa komputer yang berfungsi sebagai media utama dalam inputting data.

Aplikasi SIPD tentu memiliki beberapa kekurangan, yaitu SIPD terkadang terjadi error yang tidak diketahui penyebabnya, sehingga proses pengisian tidak dapat dilakukan.

#### **4. Tercapai tujuan**

Teori tujuan merupakan salah satu bagian dari teori motivasi yang dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 1978. Goal setting theory didasarkan pada bukti yang berasumsi bahwa sasaran (ide-ide akan masa depan; keadaan yang diinginkan) memainkan peran penting dalam bertindak. Menurut Birnberg dalam Mahennoko, (2011) bahwa teori penetapan tujuan yaitu model individual yang menginginkan untuk memiliki tujuan, memilih tujuan dan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan.

Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah dapat dilakukan secara professional seperti yang terdapat di dalam UU Nomor

23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya Sehingga terbitlah Permendagn Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur teknis pengelolaan SIPD yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat saat ini yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menyinergikan substansi Permendagn Nomor 70 Tahun 2019 kepada Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga dapat mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih berkualitas inovatif dan cepat Dengan adanya system aplikasi perencanaan penganggaran dan program kegiatan akan lebih fleksibel optimal dan efisien di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.

Dalam hal ini efektivitas dengan indikator ketepatan tujuan yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai melakukan komunikasi yang intens baik di lingkup internal instansi maupun di lingkup eksternal instansi untuk mencapai tujuan dan telah mendukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang mutakhir, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, telah tersinkronisasi data antara pusat dan daerah untuk mencapai single database nasional, salah satu dokumen yang didalamnya memuat segala aktifitas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya akan diinput di SIPD.

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang bertujuan untuk merencanakan penganggaran kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan di masa yang akan datang, seperti dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan (SKPD) yang memuat kebijakan yang berisi tentang program dan kegiatan dalam 1 tahun. Proses penyusunan RKA-SKPD bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah daerah berdasarkan struktur APBD dan kode rekening Berikut penjelasan proses penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Adapun manfaat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yaitu,

1. Untuk menyempurnakan rencana dana sesuai kebutuhan dan program dan kegiatan masing-masing bidang di masa yang akan datang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai
2. Dalam penggunaan dana program dan kegiatan dapat membatasi dalam jumlah dana yang digunakan
3. Mempermudah pengawasan dalam operasional terhadap perincian jenis sumber dana maupun jenis penggunaan dana
4. RKA (Rencana Kerja Anggaran) dipergunakan untuk menyusun anggaran yang diperuntukan seperti anggaran yang dibenkan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjar setiap tahunnya yang



digunakan agar terlaksananya program dan kegiatan pada masing-masing bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.

Fungsi RKA-SKPD digunakan untuk menampung anggaran pendapatan, anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, dan anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD. Pada prinsipnya, penyusunan anggaran di dalam RKA SKPD harus sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan masing-masing SKPD.

Meskipun dalam penerapannya sistem ini masih banyak mengalami kendala dan itu sangat menyebabkan keterlambatan, sistem ini menuntut pemerintah pusat untuk segera memperbaiki dan mengurangi kendalakendala yang berpotensi mendapatkan banyak kritik. Untuk itulah komunikasi sangat penting agar proses perbaikan sistem ini bisa berjalan cepat dan maksimal.

## **5. Perubahan nyata**

Menurut Roussel, (2006) perubahan terencana diklasifikasikan sebagai uaha yang disengaja dilakukan dengan perhitungan yang matang serta bersifat kolaboratif untuk menghasilkan perbaikan dalam sistem dengan bantuan agen perubahan. Dapat dikatakan bahwa perubahan terencana merupakan proses yang kompleks.

Dalam hal ini efektivitas dengan indikator perubahan nyata yang terjadi dilapangan menunjukan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan nasional telah

berhasil dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah dengan berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum penggunaan SIPD, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengalami kesulitan karena proses penyusunan dilakukan secara manual menggunakan excel atau microsoft access yang datanya diinput secara manual. Selain itu, pengumpulan data yang cenderung kurang efisien karena seringnya molor dalam pengumpulan, masalah lain yang dihadapi pada saat sebelum menggunakan SIPD yaitu adanya perubahan/tambahan kegiatan ditengah jalan sehingga mengharuskan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengubah secara manual dokumen perencanaan.

Menurut Christensen, (1997) teknologi berkelanjutan merupakan perkembangan teknologi yang dimaksudkan untuk meningkatkan keberlanjutan dari teknologi yang sudah ada, hal tersebut selaras dengan perkembangan dan kemajuan dari adanya sitem aplikasi SIPD yang berdampak baik pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Dinas ketahanan pangan kabupaten Sinjai yang mulai diterapkan pada tahun 2020 yang merupakan Inisiasi Kemenpan untuk menggantikan aplikasi sebelumnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yaitu perencanaan program kegiatan dan penganggaran organisasi perangkat daerah satu tahun yang bisa digunakan oleh Kasubag Program dan Keuangan yang nantinya menjadi dokumen rencana kerja anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran yang didalamnya memuat rincian program kerja. Dengan adanya penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dapat dilaporkan terinformasikan secara efektif dan efisien dalam pengelolaan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah secara transparan dan akuntabel serta dapat mempercepat atau mengefektifkan pekerjaan dipemerintahan Penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sangat mendukung dalam pelaksanaan pelaksanaan program kerja dan penganggaran dinas ketahanan pangan kabupaten Sinjai karena motivasi digunakanya sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) untuk mengsikronisasikan pelaksanaan program kerja dan penganggaran disetiap satuan kerja perangkat daerah dengan sistem yang ada pada kantor keuangan daerah dan tentu penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dapat mempercepat proses pelaksanaan program kerja dan penganggaran Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai dibandingkan sebelumnya yang masih menggunakan system manual.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan adapun saran yaitu, pemerintah pusat dapat meningkatkan lagi Bimbingan teknis kepada pemerintahan daerah karena masih cukup banyak kendala yang muncul didalam pelaksanaan aplikasi ini, serta memberikan inovasi dan peningkatan pada aplikasi SIPD itu sendiri agar tidak terjadi eror pada saat masuk aplikasi, penginputan template serta beberapa pembuatan pelaporan yang belum dapat dilakukan menggunakan SIPD, untuk BKAD Kabupaten Sinjai dapat ditingkatkannya lagi pelatihan dan bimbingan teknis bagi setiap pegawai yang menggunakan SIPD karena masih terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaan aplikasi ini. Dan dapat membuat sebuah forum atau diskusi yang dapat dilakukan secara berkala antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga dapat membahas kendala yang dihadapi agar mendapat solusi lebih cepat dan dapat juga menjadi tempat saling membantu dan memberikan masukan kedepannya agar pelaksanaan SIPD semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adani Robith Muhammad. (2020). *Sistem Informasi Manajemen Dan Manfaat Untuk Bisnis. Sistem Informasi Manajemen: Pengertian, Fungsi, Jenis Contoh* (Sekawanmedia.Co.Id)
- Amirul Hadi, Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Pustaka Setia, 1998).
- Anonim. (2020). *Hardware Komputer (Perangkat Keras) dan Fungsinya Beserta Gambarnya. Hardware Komputer (Perangkat Keras) dan Fungsinya Beserta Gambarnya*. Ilmuips.my.id - Maten Belajar Gratis (diakses pada tanggal 27 November 2021)
- Anonim. (2021). *Pengertian Sistem Informasi (SI) Menurut Para Ahli, Pengertian Sistem Informasi Tujuan, Fungsi, Komponen*. (Yuksinau. Id). Diakses Pada Tanggal 16 November 2021)
- Anonim. (2021). *Pengertian Dokumentasi, Pengkodean, Fungsi, Tugas, Manfaat. Pengertian Dokumentasi. Pengkodean. Fungsi. Tugas, Manfaat* (*adventuregamepubs.com*).
- Anwar Made, Supami Wahyu S. (2020). *Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah pemanfaatan system informasi akuntansi dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada OPD Kota Malang) Jurnal riset mahasiswa akuntansi Volume No. 1, Tahun 2020*
- Arikunto, Suharsimi, Prof. Dr. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta Rincka Cipta 2010.
- Citta Nadya Celine Wurara, Alfon Kimbal, Nemi Kumaya. (2020). *Implementasi system informasi pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020*
- Diana Hertati. (2020). *Model implementasi system informasi pemerintahan desa berbasis wab bagi pemerintahan desa di kabupaten Sidoarjo. Jurnal ilmu administrasi Negara Volume 10 (1), April 2020*
- Fahmi Irham. (2014). *Pengantar Manajemen Keuangan* Bandung: Alfabet



- Heru Kumiawan, Effiyaldi. (2020). Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas Pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi. *Manajemen Sistem Informasi Vol 5, No 3. September 2020*
- Ibnu Hadjar. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Megawati. (2020). *Penerapan System Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) Dalam menunjang pelaksanaan laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai*. Universitas Muhammadiyah Sinjai.
- Muhammad Irfan Nasution, Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI ) Kota Medan. *Jurnal Aluntansi Dan Keuangan Volume 9, Nomor 2, Agustus 2021*
- Nadya Balqis, Zuhrizal Fadhly. (2021). Ffekmitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy, Vol. 7 No. 2 (2021) Mei-Oktober*
- NKD Feradhita. (2020). Sistem Informasi Manajemen Pengertian, Fungsi, dan Contohnya. *Sistem Informasi Manajemen Pengertian, Fungsi, dan Contohnya (logique.co.id)*.
- Nugroho Wisnu. (2020). Peran Penting SIPD dalam Mengakselerasi Perwujudan Smart Governance. *Peran Penting SIPD dalam Mengakselerasi Perwujudan Smart Governance Info Komputer (grid.id)*.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah(BPKD) Kos Medan. *Jurnal Akuntansi Keuangan. Volume 9, Nomor 2, Agustus 2021*
- Putri Nanda Anggraini. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Serdang Bedagai. *Journal Economy And Currency Study (JECS) Volume 1. Issue 2, Juli 2019*.

- Riant Nugroho. (2019). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. *Jakarta Elex Media Komputindo*
- Said El Fairuz. (2012). Perangkat Lunak PERANGKAT LUNAK *Fainiz el Said (wordpress.com)*
- Susanto, Azhar. (2004). *Sistem Informasi Manajemen Konsep Dan Pengembangannya*. Bandung: Lingga Jati
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Tri Ikyarti, Nila Apila2. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Implementasi Sistem Informasi Manajemen daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Selum. *Jurnal Akuntansi Vol 9, No. 2 2019*.
- Usman & Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Zulkarnain, Dahlia, Anggyastuti Ningrum. (2020). Determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota sukabumi. *Jurnal Ilmiah Indonesiam Vol 5, No. 5 Mei 2020*.
- Sutrisno. 2007. *Manajemen Keuangan, Cetakan Kelima, Ekonesia : Yogyakarta*
- Slameto. (2018). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi (Rev. ed.)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Roussel, L., Swansburg, R. C., & Swansburg, R. J. (Eds.). (2006). *Management and leadership for nurse administrators*. Jones & Bartlett Learning.

## LAMPIRAN



**Gambar 2 Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai**



**Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Rafiuddin Masudy, S.Sos Kabag Program dan Keuangan**





**Gambar 4 Wawancara dengan Ibu Istiqamah Nurdin Sebagai Bendahara Pengeluaran**





**Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Fathul Rahmat, A.Md. sebagai Verifikator Keuangan**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2049/FSP/A.1-VIII/VIII/1445 H/2023 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

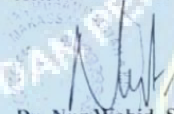
Nama Mahasiswa : Izzatul Musyarrifa  
St a m b u k : 10561 11291 19  
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara  
Lokasi Penelitian : Di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai  
Judul Skripsi : *"Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu. Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 07 Agustus 2023  
Ketua Jurusan IAN

  
Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si  
NBM : 991 742

**Gambar 6 Surat Pengantar Penelitian**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2220/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023

21 Muharram 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

08 August 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2049/FSP/A.1-VIII/VIII/1445 H/2023 M tanggal 7 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : IZZATUL MUSYARRIFA

No. Stambuk : 10561 1129119

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 Agustus 2023 s/d 11 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumulahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd**

**NBM 1127761**

08-23

**Gambar 7 Surat Permohonan Penelitian**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **23244/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.  
Lampiran : - Bupati Sinjai  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 222/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 08 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **IZZATUL MUSYARRIFA**  
Nomor Pokok : **105611129119**  
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**  
Alamat : **Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Agustus s/d 11 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 09 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**  
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*

**Gambar 8 Surat Izin Penelitian**





**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Alamat : Jl. H. A. Abd. Latief No. 08 Kabupaten Sinjai  
Provinsi Sulawesi Selatan Telp. (0482) 2425372, Fax. (0482) 22270

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

**Nomor: 526.1/11. 255 /DKP/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drh. Mappamancu, M.Anim, Sc  
Jabatan : Sekretaris Dinas  
NIP : 19800530 200502 1 004

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Izzatul Musyarifa  
Nim : 105611129119  
Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar  
Akademik : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Telah melakukan penelitian di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Selama 2 bulan, terhitung mulai tanggal 11 Agustus s/d 11 Oktober 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi untuk penelitian yang berjudul "EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 25 Agustus 2023  
Sekretaris Dinas,

**Drh. Mappamancu, M.Anim.Sc**  
**NIP. 19800530 200502 1 004**

**Gambar 9 Keterangan Telah Melakukan Penelitian**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN  
Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Izzatul Mussyarifa  
Nim : 105611129119  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	4 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Oktober 2023  
Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursinah, S.Hum.,M.I.P  
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

**Gambar 10 Surat keterangan bebas plagiat**

Izzatul musyarrifa 105611129119 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

4%

2

ejournal.uniska-kediri.ac.id

Internet Source

3%

3

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

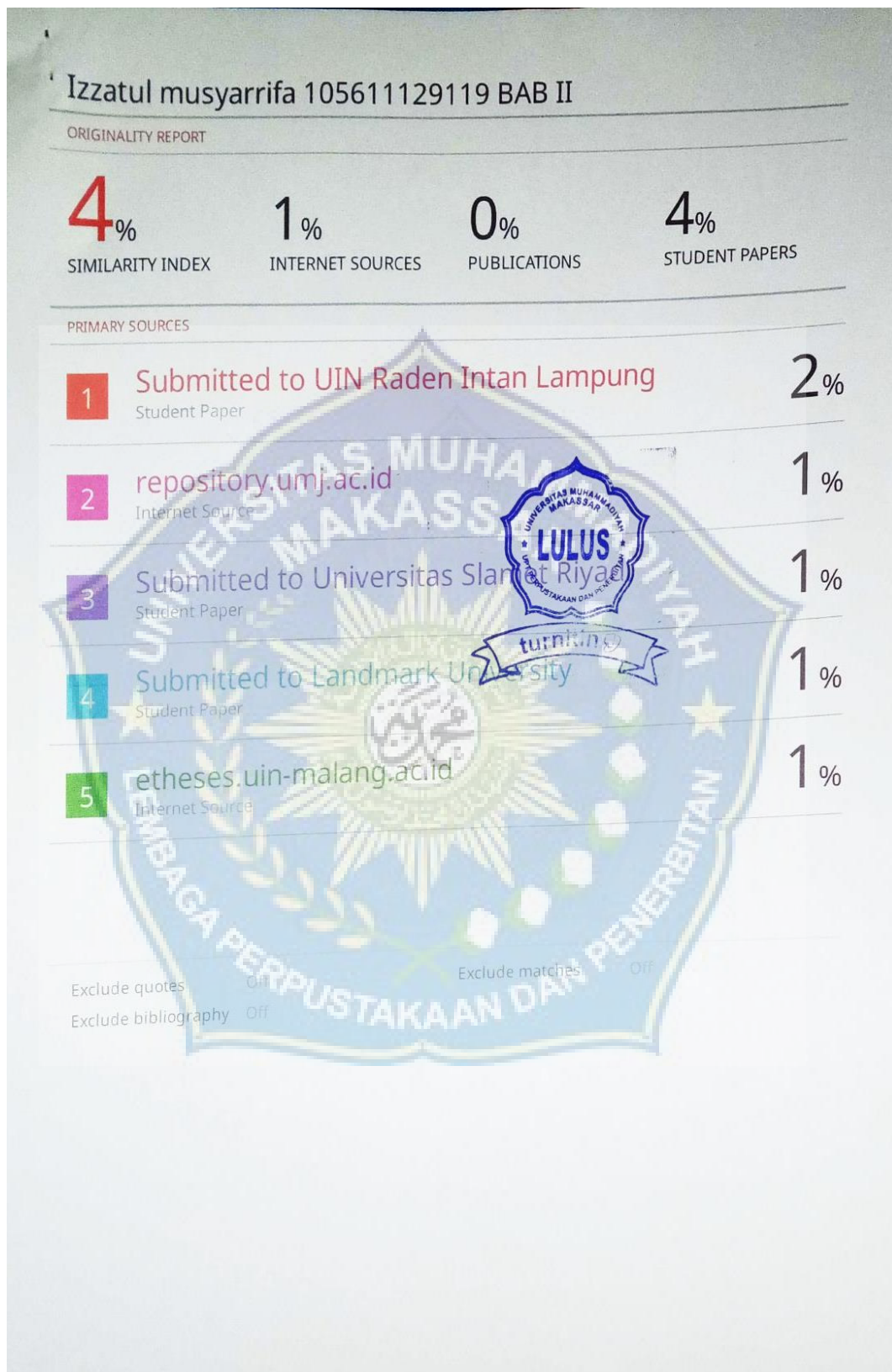
Exclude matches

Exclude bibliography

Off



Gambar 11 Bebas plagiat Bab 1



Gambar 12 Bebas plagiat Bab 2



# Izzatul musyarrifa 105611129119 BAB III

## ORIGINALITY REPORT

<b>10%</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>	<b>8%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<b>4%</b>
<b>2</b>	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<b>2%</b>
<b>3</b>	Submitted to Program Pasca Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<b>2%</b>
<b>4</b>	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<b>1%</b>

Exclude quotes  Off      Exclude matches  < 100%  
Exclude bibliography  Off

Gambar 13 Bebas plagiat Bab 3



Gambar 14 Bebas plagiat Bab 4



Izzatul musyarrifa 105611129119 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

Exclude matches



Gambar 15 Bebas plagiat Bab 5

## RIWAYAT HIDUP



Izzatul Musyarrifa, lahir pada tanggal 27 November 2001 di Sinjai Kecamatan Sinjai Utara. Ia merupakan anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan suami istri Tajuddin dan Isnawati. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 124 Lura selesai pada tahun 2013.

Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Sinjai Utara dan selesai pada tahun 2016, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Sinjai pada tahun 2019. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan perguruan tinggi swasta tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) Pada tahun 2023.